



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau)

Farhan Bayu Putra¹, Kennedy² dan Arumega Zarefar³

¹Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: farhan.bayu@student.unri.ac.id

²Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: kennedy@lecturer.unri.ac.id

³Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: arumega@lecturer.unri.ac.id

Angka realisasi keuangan dan fisik dari APBD Riau masih rendah karena daya serap baru mencapai 68,2% dan fisik 75% dari target yang seharusnya dicapai yaitu minimal 90%. Beberapa variabel yang berbeda telah diuji oleh beberapa peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji korelasi 3 (tiga) variabel independen yaitu variabel x (perencanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia) dengan 1 (satu) variabel dependen yaitu variabel y (penyerapan anggaran) pada OPD Provinsi Riau menggunakan 3 (tiga) hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan respondennya adalah kepala dinas/badan, bendahara pengeluaran dan kepala bagian di OPD Provinsi Riau. Survey dilakukan selama 52 (lima puluh dua) hari dengan tingkat partisipasi sebesar 82,72%. Data diolah dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Data dianalisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci: perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, penyerapan anggaran

Abstract

The financial realization number and physical of the Riau Regional Budget are still low because the absorption capacity has only reached 68.2% and physically 75% of the target that should have been achieved at least 90%. Several different variables have been tested by several previous researchers associated with budget absorption. The purpose of this study was to test the correlation of 3 (three) independent variables, namely variable x (budget planning, administrative records and human resource competence) with 1 (one) dependent variable, namely variable y (budget absorption) in OPD Riau Province using 3 (three) hypotheses. The method used in this study is a survey method with the respondent is the head of the department / agency, treasurer of expenditure and head of department in OPD Riau Province. The survey was conducted for 52 (fiftytwo) days with a participation rate of 82.72%. The data were processed and analyzed using SPSS version 25. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that budget planning, administrative records, and human resource competence affect budget absorption.

Keywords: *budget planning, administrative records, competency of human resources, budget absorption*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang juga dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah [1] serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [2] merupakan paket undang-undang (UU) yang telah membawa perubahan secara fundamental terhadap pengelolaan pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan menjadi penanda dimulainya era otonomi daerah di Indonesia. Salah satu tujuan dikeluarkannya paket UU tersebut yaitu agar pemerintah daerah lebih meningkatkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan komposisi pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, kesempatan, serta globalisasi kompetisi yang semakin ketat.

Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 di provinsi Riau baru mencapai 16,97 persen hingga Mei 2019, dari total anggaran Rp 9,18 triliun. Dari total anggaran yang sudah diserap, sekitar 10,6 persen digunakan untuk belanja tidak langsung dan 6,37 persen lainnya untuk belanja langsung. Secara nominal, nilainya setara dengan Rp1,56 triliun. Pada pertengahan Agustus 2019, penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 Provinsi Riau untuk fisik sudah mencapai 45,88 persen, dan keuangan 43,32 persen sehingga dikatakan belum mencapai 50 persen. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 di akhir tahun, masih jauh dari kata mengembirakan. Sebelum tutup buku pada Desember 2019 angka realisasi keuangan dan fisik dari APBD Riau belum menyentuh angka 90 persen, hanya mencapai 68,2 persen dan fisik 75 persen padahal target yang harus dicapai adalah 90 persen [3].

Hal ini membuktikan masih kurangnya tingkat penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi Riau yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk mendorong terciptanya *multiplier effect* terhadap ekonomi, kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal, apabila pengalokasian anggaran efisien, maka meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya.

Mutmainah [4] menemukan pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia dan dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini diperkuat oleh Indriani [5] yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor perencanaan anggaran, namun terdapat pengaruh yang signifikan pada kompetensi SDM dan realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rerung [6] yang menemukan bahwa komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan pelaksanaan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran sehingga penelitian ini akan menguji ulang variabel ini kembali dengan sampel dan periode yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan anggaran tahun berikutnya dan menilai kinerja pemerintah pada organisasi perangkat daerah dalam mengelola dana anggaran daerah.

2. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Definisi perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) [7] adalah “perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Tahapan perencanaan merupakan kunci sukses dalam mengelola keuangan daerah. Tahapan perencanaan ini didalam siklus pengelolaan keuangan daerah akan bersinergi dengan penganggaran. Luaran dari tahapan perencanaan ini adalah Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) yang merupakan landasan realisasi seluruh kegiatan selama tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah:

Ha₁ : Perencanaan Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

2.2 Pengaruh Pencatatan Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya. Dalam proses pelaksanaannya fungsi-fungsi administrasi adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian (Andriansyah)[8]. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa administrasi menjadi salah satu komponen dari proses pembangunan karena administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah yang tertuang dalam sistem pemerintahan. Tujuan dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian proses yang berlandaskan kepada dijalankannya administrasi secara baik dan benar. Selain itu, administrasi dapat juga dinyatakan sebagai pengelolaan terhadap data dan informasi dalam bentuk penyusunan dan pencatatan secara terurut dan terorganisir baik untuk kepentingan pihak luar maupun untuk kepentingan pihak dalam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah:

Ha₂ : Pencatatan Administrasi Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

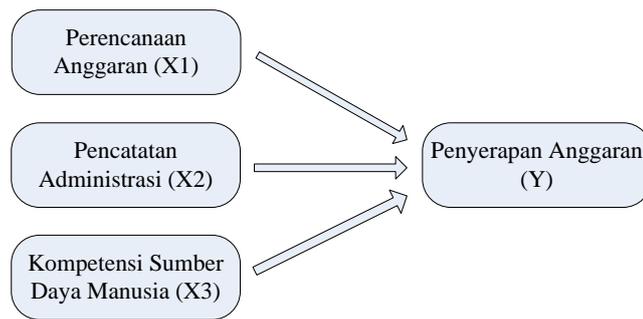
Staf yang berpengalaman dan memiliki motivasi yang tinggi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan anggaran. Pada setiap OPD sudah menjadi suatu keharusan untuk memiliki sumber daya manusia yang memiliki skill terlatih serta mampu untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan sesuai kompetensi yang dimiliki. Staf harus memiliki uraian tugas yang sesuai dengan kompetensi [9]. Apabila setiap OPD sudah mempunyai SDM yang kompeten sesuai dengan uraian tugas yang diberikan, maka ini menjadi salah satu indikator untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah:

Ha₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

2.4 Model Penelitian

Model penelitian yang menggambarkan korelasi antara variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan variabel dependen yaitu penyerapan anggaran diperlihatkan pada gambar 1 dibawah.



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan. Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survey. Metode survey adalah penelitian yang menggunakan angket sebagai alat penelitian pada populasi, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan hubungan antar variabel.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Pekanbaru. Yang menjadi objek penelitian ini adalah bank BUMN di kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilakukan pada 23 Juni sampai 14 Agustus 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah 27 (dua puluh tujuh) OPD yang berada di Provinsi Riau dengan target respondennya adalah Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Bendahara Pengeluaran. Jumlah kuisisioner yang sudah diedarkan berjumlah 81 kuisisioner dengan sebaran 60 kuisisioner ke Dinas-Dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. 21 kuisisioner lainnya disebarikan ke Badan-Badan seperti Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan lain-lain. Dari 81 kuisisioner yang disebarikan hanya 69 Pegawai OPD yang turut mengisi kuisisioner penelitian dan terdapat 2 kuisisioner yang tidak digunakan dikarenakan tidak lengkap diisi oleh responden. Sehingga dari 81 kuisisioner yang disebarikan, yang tidak mengembalikan ada 11 kuisisioner dan 2 kuisisioner yang tidak digunakan sehingga respon rate adalah 82,72%.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Demografi Responden

Sebanyak 67 responden mengembalikan kuisisioner dari total 81 kuisisioner yang diedarkan. Secara demografis, jumlah responden laki-laki (61,19%) lebih banyak dari responden perempuan (38,81%). Dari segi umur, 14,93% responden memiliki umur rentang 26-35 tahun, 49,25% rentang umur 36-45 tahun, 26,86% rentang umur 46-55 tahun, sisanya 8,96% memiliki

umur diatas 55 tahun. Selanjutnya berdasarkan lama bekerja, 65,67% sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan 34,33% bekerja kurang dari 10 tahun. Dari sisi pendidikan terakhir, 46,27% responden memiliki pendidikan Magister, 52,24% berpendidikan Sarjana dan sisanya 1,49% berpendidikan Diploma. Untuk jabatan, 29,85% menduduki jabatan sebagai kepala Dinas/Badan, 35,82% sebagai Kepala Bagian, 34,33% sebagai Bendahara Pengeluaran. Hasil 67 responden diperoleh informasi umum seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi (n)	Persentasi (N%)
Jenis kelamin:		
a. Laki-laki	41	61,19%
b. Perempuan	26	38,81%
Jumlah	67	100%
Usia:		
a. 26-35 Th	10	14,93%
b. 36-45 Th	33	49,25%
c. 46-55 Th	18	26,86%
d. > 55 Th	6	8,96%
Jumlah	67	100%
Lama Bekerja:		
a. < 10 Th	23	34,33%
b. > 10 Th	44	65,67%
Jumlah	67	100%
Pendidikan Terakhir:		
a. Magister	31	46,27%
b. Sarjana	35	52,24%
c. Diploma	1	1,49%
Jumlah	67	100%
Jabatan:		
a. Kepala Dinas/Badan	20	29,85%
b. Kepala Bagian	24	35,82%
c. Bendahara Pengeluaran	23	34,33%
Jumlah	67	100%

4.2 Hasil Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19)[10].

Hasil analisis deskriptif untuk variabel-variabel dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Anggaran (Y)	67	6	15	10,79	2,153
Perencanaan Anggaran (X1)	67	27	40	33,42	3,385
Pencatatan Administrasi (X2)	67	10	20	15,06	2,405
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	67	30	50	40,30	4,299
Valid N (Listwise)	67				

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Penyerapan Anggaran (Y) memiliki nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum 15 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 10.79 dengan standar deviasi sebesar 2,153. Variabel Perencanaan Anggaran (X1) memiliki nilai

minimum sebesar 27, nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 33,42 dengan standar deviasi sebesar 3,385. Variabel Pencatatan Administrasi (X2) memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 15,06 dengan standar deviasi sebesar 2,405. Dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) memiliki nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 40,30 dengan standar deviasi sebesar 4,299.

4.3 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini diperoleh df=67-2=65. Nilai r_{tabel} dengan derajat bebas (df) 65 adalah sebesar 0,244.

Berdasarkan hasil pengolahan data, untuk instrumen Penyerapan Anggaran nilai terkecil 0,700. untuk instrumen Perencanaan nilai terkecil 0,390. untuk instrumen Pencatatan Administrasi nilai terkecil 0,615. Kompetensi Sumber Daya Manusia nilai terkecil 0,317. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan variabel pada penelitian ini adalah valid.

4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat dari tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Penyerapan anggaran	0,856	0,60	Reliabel
Perencanaan anggaran	0,820	0,60	Reliabel
Pencatatan administrasi	0,819	0,60	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,840	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel yang terdiri dari penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi SDM penelitian telah memenuhi kriteria uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel yang ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* > 0,60.

4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Hasil uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5,380	1,859		-2,894	0,005
Perencanaan Anggaran	0,158	0,072	0,248	2,203	0,031
Pencatatan Administrasi	0,262	0,097	0,293	2,698	0,009
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,170	0,060	0,340	2,824	0,006

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -6,109 + 0,158X_1 + 0,262X_2 + 0,170X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggaran

X1 = Perencanaan

X2 = Pencatatan Administrasi

X_3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

ϵ = Variabel Pengangguan (error)

α = Konstanta

β = Koefisien arah regresi

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Dari hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa $t_{hitung}(2,203) > t_{tabel}(1,998)$ dan Sig (0,031) < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima, yang berarti bahwa variabel perencanaan anggaran (X_1) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan Anggaran memiliki peran penting dalam penelitian ini, sebab apabila perencanaan anggaran dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan dilengkapi oleh data yang sistematis serta mudah dipahami akan mempermudah dan mempercepat berjalannya kegiatan penyerapan anggaran, sehingga anggaran yang diserap akan lebih dengan optimal sesuai dengan tujuan yang ditentukan dan waktu yang dilaksanakan.

Terlambatnya daya serap suatu anggaran, menurut Halim (2014:91) merupakan cerminan ketidaksiapan dan lemahnya perencanaan dari program pemerintah. Hal ini disebabkan karena perencanaan anggaran adalah faktor yang paling menentukan yang akan mengendalikan dan menentukan arah yang harus dijalani oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monik Zarinah (2016)[11], Deiby (2016)[12], Prasetyo Adi Priatno (2013)[13], Mutmainna (2017)[4], Halimah Lelinta Kaban (2016)[14] Herriyanto (2012)[15], dan Ledy S. Gagola (2017)[16] mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh pada penyerapan anggaran. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tisa Indirani (2016)[5] yang menyatakan, bahwa perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengaruh Pencatatan Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Dari hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa $t_{hitung}(2,698) > t_{tabel}(1,998)$ dan Sig (0,009) < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima, variabel pencatatan administrasi (X_2) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Dalam penelitian ini pencatatan administrasi memiliki peranan penting terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi yang dilaksanakan secara baik, yaitu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan akan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.

Administrasi Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan bentuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pencatatan administrasi akan menjadi bukti bagi pemerintah dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan kegiatan sehingga administrasi yang menunjang berjalannya roda pemerintah wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012)[15], yang menemukan hasil penelitian pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran mengungkapkan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh pada penyerapan anggaran, semakin baiknya pencatatan administrasi dalam suatu organisasi akan meningkatkan penyerapan anggaran dalam suatu organisasi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mutmainna (2017)[4] yang menyatakan bahwa pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.8 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

Dari hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa $t_{hitung} (2,284) > t_{tabel} (1,998)$ dan $Sig (0,006) < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima, variabel kompetensi SDM (X_3) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi SDM maka semakin tinggi penyerapan anggaran.

Kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini juga memiliki peran penting terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sebab, sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan dan pelatihan akan mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan berupa keahlian, pengetahuan, serta sikap perilaku sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sebab dengan hal-hal itulah pegawai pemerintahan dapat menjalankan tugasnya secara tepat, professional, efektif, dan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monik Zarinah (2016)[11], Deiby (2016)[12], Tisa Indriani (2016)[5], Mutmainna (2017)[4], dan Herriyanto (2012)[15], yang menyatakan kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, kompetensi SDM membutuhkan kemampuan dan kewenangan pemimpin untuk menjelaskan peran masing-masing anggota dengan cara meninjau kembali tugas-tugas, pendelegasian wewenang hak, kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam *job description*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013)[13] menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian Koefisien Determinasi terlihat pada tabel di bawah ini:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0.765	0.585	0.565	1.420

Dari tabel diatas diperoleh nilai R *square* sebesar 0.585. artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 58,5% sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

5. Kesimpulan

Dari hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu perencanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran (studi pada OPD Provinsi Riau). Semakin baik perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya yang ada pada OPD Provinsi Riau akan menjadikan tingkat penyerapan anggarannya semakin baik pula.

Keterbatasan untuk penelitian ini adalah 1). Tidak melakukan wawancara langsung kepada responden sehingga masih ada kemungkinan-kemungkinan kelemahan yang ditemui 2). Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada OPD Provinsi Riau saja serta 3). Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen.

Saran pada penelitian selanjutnya: 1). Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat mengendalikan jawaban tiap responden, 2). Pada penelitian selanjutnya perlu melakukan penelitian pada ruang lingkup yang lebih luas, dan 3). Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga diharapkan untuk peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel lain bisa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah (Desentralisasi)*
- [2] Undang Undang nomor 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*
- [3] www.goriau.com
- [4] Mutmainna, Iqbal 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Makasar: Universitas Fajar.
- [5] Indriani, Tisa. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja daerah. Universitas Pendidikan Indonesia: *Perpustakaan.upi.edu*
- [6] Rerung, E.D. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- [7] Undang Undang nomor 25 tahun 2004 *Tentang Defenisi Perencanaan*
- [8] Andriansyah., M.Si. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- [9] Hovart, A. (2005). *Why Does Nobody Care about The Absorption?. WIFO Working Paper*. No. 258. Vienna.
- [10] Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [11] Zarinah, Monik. 2015. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Tesis. Banda Aceh. Pascasarjana Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam. *Jurnal ekonomi dan bisnis vol 9-10*
- [12] Deiby Isilda Alumbida, David P.E. Saerang, Ventje Ilat 2016. Pengaruh perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Manado: Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Vol.9*
- [13] Adi Priatno, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- [14] Lelinta Kaban, Halimah. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dengan Kualitas SDM Sebagai Variabel Intervening Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- [15] Herriyanto, H. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis*. Jakarta: FEUI.
- [16] Gagola, Ledy. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.